**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Papua salah satu provinsi yang terletak di Timur Indonesia ini masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penentuan pendapat rakyat (PEPERA) dengan landasan hukum Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 yang sekaligus menjadi pengakuan atas Integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum Internasional. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat namun Pada tahun 1969 Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat[[1]](#footnote-1).

Papua memiliki luas wilayah 421.981 km2 yang berarti tiga setengah kali lebih besar dari pulau Jawa dan dengan sumber daya alam yang melimpah. Secara korelasi, seharusnya sumber daya alam tersebut mampu mensejahterakan rakyatnya dan mengurangi tingkat kemiskinan di Papua. Namun, sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian masyarakat Papua merasa kurang puas dan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena faktanya berdasarkan Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan Indonesia 28,17% berada di Papua dan 25,82% berada di Papua Barat. Kondisi kemiskinan tesebut tampak pada terisolirnya sebagian besar penduduk Papua yang tempat tinggalnya *relative* jauh dan tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan pemerintahan dan pelayanan sosial.

Munculnya Separatis di Papua salah satunya dikarenakan ketidakpuasan secara ekonomi yang kemudian menjadi penyebab munculnya semangat untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Selain itu pemerintah pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan yang merata di papua. Selain aspek ekonomis, separatis di Papua juga di latar belakangi oleh peminggiran sosial budaya, diskriminasi politik dan hukum di Papua dan konflik yang berakar dari kekecewaan *historis*. Adanya perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua masuk kedalam wilayah NKRI yang menyebabkan penduduk Papua merasa tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Adapun perspektif kekecewaan *historis* menurut Ferry Kareth PEPERA tidaklah sah, karena dilaksanakan dibawah tekanan. PEPERA yang dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan *one man one vote* sesuai New York Agreement. Sejarah mencatat masuknya Papua ke NKRI karena direbut bukan atas dasar keinginan sendiri[[2]](#footnote-2), hal ini lah yang kemudian menjadi perdebatan.

Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kemudian disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak tahun 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM kepada pemerintah Indonesia ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan *pamphlet*, aksi perusakan dan pelanggaran batas negara. Demi mengatasi semakin banyaknya pemberontakan separatis pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua mengadakan operasi militer yang kemudian ini justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM sehingga memperkuat keinginan rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Banyaknya permasalahan di Papua menyulitkan pemerintah untuk membuat model penyelesaian yang tepat dari setiap masalah yang ada. Alih-alih mengurangi sumber-sumber konflik dan menyelesaikannya, pemerintah cenderung membuat kebijakan dan peraturan transisional yang bersifat *ad hoc*, secara politik dan hukum tidak konsisten serta tidak ramah terhadap suasana hati dan pikiran orang asli Papua. Contohnya adalah inpres No. 1/2003 tentang percepatan pemekaran Irjabar dan Irjateng dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77/2007 tentang lambang daerah. PP No. 54/2005 tentang Majelis Rakyat Papua, meskipun kehadirannya merupakan tuntutan *public* dan pemerintah Provinsi Papua, isinya mereduksi wewenang MRP dan mengecewakan sebagian publik di Papua. Kesemuanya itu secara subtansi tidak konsisten dengan jiwa dan subtansi UU No .21/2001 tentang Otsus. Terlebih lagi kurangnya komunikasi yang baik dari kalangan pemimpin Papua, baik dari lembaga negara maupun ditengah masyarakat sipil sehingga tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk secara strategis mempengaruhi bentuk dan arah kebijakan pemerintah pusat yang sesuai dengan aspirasi rakyat Papua. Hal ini menjadikan suasasna politik di dominasi oleh hubungan yang tidak sehat antara Nasionalis Indonesia yang menonjolkan NKRI Harga Mati dan kelompok Nasionalis Papua yang juga menonjolkan Papua Harga Mati[[3]](#footnote-3).

Pada awal tahun 2006 migrasi *illegal* dilakukan oleh 43 warga Papua yang menggunakan perahu untuk berlayar ke Australia. Mereka teridiri dari 30 orang laki-laki, 6 perempuan dan 7 anak-anak yang berkewarganegaraan Indonesia dan berasal dari Papua. Mereka bertolak dari Merauke, dan berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York Australia timur laut. Tujuan pelayaran tersebut adalah untuk mendapatkan perlindungan atau yang lazim disebut sebagai suaka dari Pemerintah Australia dengan alasan yang diajukan adalah hilangnya rasa aman, ketika memadamkan gerakan separatis, militer Indonesia melakukan aksi genosida di Papua.[[4]](#footnote-4) Secara politik, mereka mendukung gerakan pro kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena dengan tindakannya akan menjadi sorotan dunia internasional bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM berat yang kemudian diamini oleh pemerintah Australia melalui departemen Imigrasinya (DIMIA) pada bulan maret 2006, dengan cara memberikan *Temporary Protection Visa* (Visa tinggal sementara) kepada 42 dari 43 warga Papua tersebut.

Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena memiliki sejarah hubungan antara masing-masing daerah terburuk adalah Papua[[5]](#footnote-5) yang memiliki sejarah terpanjang hubungan buruk dengan Jakarta. Bila dihitung waktu, maka Papua sampai dengan tahun 2014 sudah genap 51 tahun (sejak 1 Mei 1963)[[6]](#footnote-6). Artinya sudah 51 tahun persoalan Papua menjadi persoalan negara dan bangsa Indonesia yang belum terselesaikan bahkan cenderung semakin diperpanjang. Salah satu persoalan yang membuat *ecararelasi a substansial* buruk adalah soal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dimaksud dengan soal HAM di Papua memiliki banyak aspek dan banyak turunannya. Intinya adalah, bagaimana agar hak-hak hidup yang layak bagi orang Papua, sama dengan hak-hak hidup yang layak bagi warga negara Indonesia di wilayah lain di Indonesia. Antara lain: hak mendapatkan penghargaan atas martabat kepapuaan orang asli Papua; hak untuk mendapatkan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang layak, hak untuk menyampaikan suara kritis mereka secara bebas dan pantas, belum lagi hak atas tanah ulayat dan kekayaan sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah, di atas tanah, di laut di wilayah Papua[[7]](#footnote-7).

Kondisi ini lah yang kemudian membuat hubungan Indonesia-Australia kian memanas. Dalam jajak pendapat di sidang paripurna DPR menilai Australia telah melecehkan Indonesia di mata Internasional. Pemerintah diminta untuk tidak percaya dengan standar ganda Australia. Pasalnya, Australia sering menolak imigran terutama dari Indonesia yang mencoba masuk ke negerinya. Bahkan Perdana Menteri Australia John Howard berencana mengubah undang-undang agar pulau Christmas dan pulau Ashmore dinyatakan sebagai zona bebas migrasi.[[8]](#footnote-8) Selain itu adanya peringatan HUT Papua merdeka dan pengibaran Bendera bintang kejora di 10 kota di Australia secara tidak langsung telah mendukung kemerdekaan Papua.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian keputusan Australia dalam memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua sangat melecehkan Integrasi Papua dalam NKRI pasalnya Australia telah mengakui integrasi Papua ke dalam NKRI melalui Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969, tentang status Papua yang sah menurut hukum Internasional dan menjadi bagian integral NKRI. Akan tetapi pemerintah Australia terbukti melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatis di Papua.

Dalam proses pembahasan masalah ini, penulis mencoba mengambil beberapa teori dan konsep yang mempunyai relevansi dengan *core subject* pada Ilmu Hubungan Internasional terutama Hukum Internasional, Diplomasi Internasional dan Politik Internasional sekalipun tidak menutup kemungkinan memiliki kolerasi dengan *core subject* lainnya, yaitu Politik Luar Negeri dan Hak Asasi Manusia pada pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan politik luar negeri Indonesia – Australia dalam masalah Papua yang diwujudkan dalam bentuk skripsi, dengan berjudul : “**SIKAP INDONESIA TERHADAP KETERLIBATAN AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN DI PAPUA”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Penuntasan masalah HAM di Papua perlu diiringi dengan sebuah penyikapan yang tegas terhadap semua upaya gangguan dan ancaman tehadap keamanan dan kedaulatan negara termasuk standar yang saat ini diterapkan Australia dalam menyikapi masalah Papua. Kalaupun para pelaku pelanggaran HAM dikenakan hukuman, maka tidak berarti kemudian ketegasan terhadap para separatis OPM dikendurkan. Justru sebaliknya, apabila upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM ini benar-benar tuntas, maka upaya-upaya pemberantasan terhadap kelompok separatis pun harus ditingkatkan. Dalam hal ini, bukan saja operasi militer dan kamtibmas, tetapi juga upaya-upaya kesejahteraan harus direalisasikan secara konsekuen dan konsisten .

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pendekatan kesejahteraan adalah maraknya korupsi di kalangan pejabat daerah di Papua, sehingga anggaran pembangunan dan dana otonomi khusus yang selama ini telah triliunan digelontorkan ke Tanah Cenderawasih itu ternyata tidak membawa hasil yang nyata. Papua tetap saja menjadi daerah yang paling terpuruk dalam soal infrastruktur utama, dan juga memiliki kualitas hidup (khususnya penduduk pribumi) yang rendah. Rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan, langkanya pekerjaan yang layak, dan pengangguran yang tinggi adalah persoalan dasar masyarakat lokal Papua yang semua orang tahu namun tampaknya tidak ada upaya memecahkannya secara sistemik. Yang sampai sekarang tampak adalah upaya-upaya ad-hoc yang tampak indah di media massa tetapi hanya di permukaan belaka[[10]](#footnote-10).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Gerakan Separatis Papua?
2. Bentuk-bentuk dukungan apa saja yang diberikan Australia terhadap kelompok separatis Papua?
3. Bagaimana sikap Indonesia terhadap Australia terkait dengan dukungannya pada gerakan papua merdeka?

## **Pembatasan Masalah.**

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan di kemukakan, maka penulis membatasi permasalahan pada upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi standar ganda Australia atas dukungannya pada gerakan separatis Papua.

## **Perumusan Masalah.**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut : **“Bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia terhadap Australia terkait dengan pemberian suaka kepada warga papua ”**.

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. **Tujuan Penelitian**
2. Mengetahui apa saja bentuk dukungan Australia terhadap gerakan separatis Papua.
3. Mengetahui kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis Papua.
4. Mengetahui prospek pendekatan kesejahteraan Papua yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Papua secara keseluruhan.
5. **Kegunaan Penelitian**
6. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai politik luar negeri Indonesia dan Australia atas Papua.
7. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan HAM, gerakan separatis Papua dan dukungan Australia pada kemerdekaan Papua.
8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian kepada masalah Papua.
9. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

## **Kerangka Teori, Hipotesis Penelitian, Operasionalisasi Variabel dan Skema Teoritik.**

1. **Kerangka Teori**

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya[[11]](#footnote-11).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson, mengemukakan bahwa[[12]](#footnote-12):

**Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.**

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional.

Pada perkembangannya teori hubungan internasional pada awalnya negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Namun pasca perang dunia kedua aktor-aktor dalam hubungan internasional juga mengikut sertakan peran non-negara. Setelah perang dunia kedua, realisme menjadi yang paling dominan dalam teori hubungan internasional. Pada tahun 1970, realisme klasik Claude, Carr, Morgenthau, Niebuhr dan lain-lain ditantang oleh liberal, seperti Robert Keohane dan Joseph Nye, yang menekankan saling ketergantungan antara negara, hubungan transnasional dan aktor non-negara, khususnya multinasional (MNCs). Hubungan internasional itu tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem 'bola bilyar bertabrakan', tetapi sebagai cobweb hubungan politik, ekonomi dan sosial yang mengikat aktor sub-nasional, nasional, transnasional, internasional dan supranasional[[13]](#footnote-13).

Dalam penelitian ini aktor-aktor yang terlibat adalah antara Negara dan Negara serta Negara dengan non-negara, yakni Indonesia dengan Australia dan Indonesia dengan kelompok separatis Papua. Charles Hermann, mengemukakan bahwa politik luar negeri adalah :

***calls foreign policy a neglected concept. He asserts, This neglect has been one of the most serious obstacles to providing more adequate and comprehensive explanations of foreign policy.” Hermann thinks that part of the reason for this neglect is that “most people dealing with the subject have felt confident that they knew what foreign policy was.” To put it colloquially, we know it when we see it. Ultimately, Hermann defines foreign policy as “the discrete purposeful action that results from the political level decision of an individual or group of individuals. . . . [it is] the observable artifact of a political level decision. It is not the decision, but a product of the decision.” Hermanndefines foreign policy as the behavior of states*.**[[14]](#footnote-14)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 1 ayat 2 bahwasannya “Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Lebih lanjut penjelasan dalam tafsir mahkamah konstitusi terhadap politik luar negeri Indonesia adalah “Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat”.

Politik luar negeri tentunya hanya bisa dijalankan oleh negara yang berdaulat, karena dalam negara yang berdaulat terbangun sistem demokrasi yang seluruhnya didasarkan pada konsensus rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sependapat dengan hal itu disampaikan oleh [John Locke](https://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke), [Montesquieu](https://id.wikipedia.org/wiki/Montesquieu) dan [J.J Rousseau](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J.J_Rousseau&action=edit&redlink=1)[[15]](#footnote-15), sebagai berikut : “Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal [raja](https://id.wikipedia.org/wiki/Raja) atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara [demokrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi)”. Lebih jauh John Locke[[16]](#footnote-16) menyatakan tentang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintah demokrasi adalah :

**Kedaulatan adalah kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan.**

Agar kedaulatan rakyat yang dipercayakan kepada negara dalam sistem pemerintah yang demokratis berjalan dengan baik, tentunya negara memiliki kepentingan nasional sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya baik dari kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatau negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasinoal secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[17]](#footnote-17) Mempertahankan wilayah dalam suatu negara juga merupakan suatu kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh Arnold Wolfers sebagai berikut :

**Kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam negara yang menghadapi kondisi berlainan[[18]](#footnote-18).**

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi keberlangsungan bangsanya. Seperti yang dijelaskan oleh Hans J Morgenthau sebagai berikut :

**Kepentingan nasional sebagai power (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatau negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik**[[19]](#footnote-19).

Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi keberlangsungan jangka panjang. Kepentingan nasional dewasa ini mengarah pada masalah internal dari suatu bangsa. Kepentingan nasional erat kaitannya dengan masalah keamanan, integritas dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Apabila tercipta keamanan nasional maka kepentingan nasional akan mudah terwujud. Kemanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri yaitu untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan mempertahankan keamanan nasional.

Di dalam konsep ini, terdapat tiga kepentingan inti yang secara mendasar dapat mendapatkan ancaman dari luar, yaitu; pertama, adalah *physical security* atau keamanan fisik dari masyarakat suatu negara dan hak milik pribadi mereka; yang kedua adalah *rules and institution* yang dilaksanakan suatu masyarakat negara, khususnya konstitusi dan aturan formal lainnya; ketiga adalah *prosperity* yaitu sumber modal, barang mentah, sistem keuangan dan lain-lain[[20]](#footnote-20).

Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap perbedaan pendapat posisi yang tidak selaras dan tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antar individu dan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berupa nonfisik tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik. Adapun konflik menurut Max Weber yaitu :

**Hubungan sosial disebut konflik apabila sepanjang tindakan yang ada didalamnya secara sengaja ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatau hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain**[[21]](#footnote-21)

Setidaknya ada beberapa kondisi yang mengarah pada terjadinya konflik, yaitu :

*Pertama*, pemicu konflik adalah ketidakharmonisan kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya tertentu dengan negara dan negara cenderung mengalaminya dengan alasan eksistensi dan keutuhan negara. Akibatnya terjadi dorongan kelompok identitas tertentu untuk melawan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga yang mempresentasekannya.

*Kedua*, konflik dikaitkan dengan kegagalan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi kemsikinan secara sistematis. Proses tersebut telah melahirkan kantong-kantong kemiskinan sementara kekusaan politik dan ekonomi di pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi sumberdaya alam daerah-daerah yang dilanda konflik. Tetapi kebutuhannya tidak hanya mencakup ekonomi juga rasa aman dan pengakuan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

*Ketiga*, karakteristik pemerintah yang otoriter dan mengakibatkan penekanan pada stabilitas politik dan keamanan yang kaku dan telah mengabaikan hak sipil dan politik dari kelompok identitas tertentu sehingga mereka memendam rasa tidak puas dan frustasi yang mendalam.

*Keempat*, sistem ketergantungan yang terjadi di suatu negara dengan sistem ekonomi global yang dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya dalam melindungi kepentingan investor asing. Negara rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar sebagai manusia. Seperti yang dikemukakan Gibson:

**Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula menimbulkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja satu sama lain**[[22]](#footnote-22).

Konflik yang tidak kunjung usai akan mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahnya dalam menangani segala permasalahan yang ada. Jika dibiarkan berlarut-larut kondisi seperti ini dapat memicu munculnya gerakan-gerakan anti pemerintahan yang terorganisir atau biasa disebut separatis.

Gerakan separatis tentunya berdampak pada keamanan suatu daerah atau wilayah, karena gerakan separatis selalu saja menjadi penghalang bagi kegiatan pemerintahan. Menyadari akan pentingnya keamanan pada suatu negara Milburn J.Thompson[[23]](#footnote-23) memberikan definisi keamanan sebagai berikut :

**Keamanan adalah suatu paham bahwa tidak ada satupun negara dapat merasa aman sebelum setiap negara, khususnya negara musuhnya, dapat merasa aman. Keamanan bangsa-bangsa adalah sesuatu yang saling tergantung: tindakan dari suatu negara yang mengancam keamanan negara lain dapat menghancurkan keamanan semua negara, termasuk negara agresor. Jika konsep ini dikontekstualisasikan, dampaknya akan mendorong komunitas dunia bergerak melampaui perang menuju pembangunan berbagai struktur dan intuisi untuk memfasilitas resolusi konflik internasional. Keamanan seutuhnya memperluas lingkup kemanan dengan memperhatikan isu-isu kesenjangan kaya-miskin, masalah ekologis, HAM, nasionalisme etnis dan hak-hak kaum minoritas, selain masalah perlombaan senjata dan kekuasaan poltik. Amerikat Serikat, misalnya, jelas memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan diri dari ancaman yang masuk ke dalam wilayahnya atau mengganggu kepentingannya. Namun, Amerika Serikat juga rentan terhadap fenomena pemanasan global dan pengikisan lapisan ozon, kelangkaan sumber daya alam, dan sebagainya.**

Sasaran gerakan separatis sendiri adalah memberikan ancaman pada keamanan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari satu wilayah atau kelompok manusia (kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Adapun beberapa faktor yang memicu timbulnya separatis antara lain :

1. Krisis ekonomi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi
2. Krisis politik, konflik antara elit politik yang hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompoknya, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Krisis politik menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam menghadapi krisis ekonomi. Krisis politik juga dapat dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada timbulnya rasa ketidakadilan.
3. Krisis sosial. Sikap primordialisme dan eksklusivisme bernuansa SARA, pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan.
4. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah.
5. Intervensi internasional, adanya pihak dari luar negeri masuk kedalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut.

Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Dikatakan salah satunya karena hukum internasional mengenal beberapa cara penyelesaian persengketaan internasional secara paksa, yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Restorsion (pembalasan setimpal),
2. Reprisal (pembalasan setimpal),
3. Pasific blockade (blokade damai),
4. Intervensi.

Intervensi dapat diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara
dalam urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau
ancaman kekuatan, sedangkan intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukakan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah Negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan Negara tersebut.[[25]](#footnote-25)

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro, memberi pengertian intervensi sebagai berikut:

**Dalam hukum internasional *intervention* tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan Negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi**[[26]](#footnote-26).

Alasan suatu negara melalukan intervensi biasanya dikarenakan adanya suatu kondisi HAM yang berat, begitu juga dengan kondisi di Papua yang digambarkan oleh ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai berikut :

**Akibat penerapan operasi militer, selama kurun waktu di bawah rejim orde baru, setidaknya telah 100 ribu lebih penduduk asli Papua terbunuh. Sasaran pembunuhan tidak saja pada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh OPM, tetapi juga terhadap masyarakat Papua yang dianggap sebagai basis kekuatan OPM.**

Paparan diatas menunjukan adanya pelanggaran HAM di Papua dengan penerapan operasi militer di Papua yang sudah memakan korban bukan hanya saja anggota OPM akan tetapi masyarakat Papua yang dianggap berafiliansi dengan OPM menjadi sasaran intimidasi militer pada saat itu. Terlebih masyarakat yang sama sekali tidak terlibat dengan OPM menjadi ketakutan dan mengalami trauma yang sangat panjang serta tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan hak dasarnya terutama sekali hak untuk mendapatkan kehidupan sosial yang nyaman dan tentram. Untuk itu, penulis akan membahas lebih jauh bagaimana kaitan antara globalisasi dan HAM melalui studi kasus pelanggaran HAM di Papua dengan mengkaji sejauh mana peran globalisasi (dalam bentuk media dan organisasi non pemerintah) dalam kasus pelanggaran HAM di Papua.

Beratnya kondis HAM di Papua mendorong lahirnya gerakan separatis di Papua yang diawali dengan berdirinya OPM, menurut data Bishop[[27]](#footnote-27) gerakan OPM adalah :

**Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai** [**Irian Jaya**](https://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jaya)**, dan untuk memisahkan diri dari** [**Indonesia**](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia)**.**

**Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran** [**bendera Bintang Kejora**](https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Bintang_Kejora)**, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari** [**konflik Papua**](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua)**. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan** [**Hai Tanahku Papua**](https://id.wikipedia.org/wiki/Hai_Tanahku_Papua) **dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah** [**Perjanjian New York**](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_York)**.**

Tidak dapat disangkal bahwa setelah kematian Theys Hiyo Eluay[[28]](#footnote-28) gerakan pembebasan Papua telah mengambil bentuk yang sama sekali lain. Jika sebelumnya, gerakan-gerakan pro-kemerdekaan Papua lebih berorientasi elitis sambil tetap memelihara sayap militer dalam berhadapan dengan pemerintah Indonesia, maka saat ini yang muncul adalah kekuatan organisasi massa.

Lahirnya aktivis-aktivis Papua dari generasi yang lebih muda. Mereka lebih berdisiplin, memiliki ikatan ke dalam yang jauh lebih kuat, dan lebih terbuka dalam mengadopsi taktik dan strategi baru dalam gerakan.

Itulah yang direpresentasikan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB)[[29]](#footnote-29). Organisasi ini bergerak di lapisan kaum muda terdidik Papua terutama mahasiswa dan pelajar. KNPB juga sangat mengerti teknologi. Operasi dan jaringan media sosial KNPB, misalnya, cukup maju sehingga mereka bisa mengorganisasi gerakan dengan cepat. Tidak pelak lagi, KNPB menjadi organisasi Papua yang paling militan. Gerakan aksi massa KNPB tidak saja dijalankan di Papua namun juga di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tampaknya, aparat keamanan Indonesia tidak berdaya dalam mengendalikan KNPB. Jalan pintas diambil oleh aparat keamanan. Kepemimpinan dan anggota KNPB menjadi target pembunuhan oleh aparat-aparat keamanan. Sejak organisasi ini didirikan tahun 2008 hingga 2014 ada 29 anggotanya dibunuh dan puluhan lainnya di penjara. Pada tahun 2012, wakil ketua KNPB, Mako Tabuni dibunuh oleh aparat berpakaian preman.**

**Tidak ada organisasi di Indonesia yang menjadi korban pembunuhan tepat sasaran *(targeted killings)* sebesar KNPB. Bahkan organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris sekalipun.**

**Aparat keamanan Indonesia juga melakukan banyak penangkapan terhadap peserta aksi-aksi unjuk rasa yang digelar seakan tidak kenal lelah oleh para aktivis Papua. Pemerintahan presiden Jokowi cukup ‘berprestasi' dalam melakukan penangkapan ini. Organisasi *Papua itu Kita* mencatat bahwa ada 653 penangkapan terjadi antara April 2013-Desember 2014 dan 479 penahanan aktivis dari 30 April-1 Juni 2015. Tentu, penangkapan-penangkapan itu juga kerap disertai dengan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan**[[30]](#footnote-30).

Jalan diplomatik Indonesia tampaknya tidak akan mulus. Sekalipun diplomat-diplomat Indonesia terkesan meremehkan kekuatan kecil Australia. Dalam pertarungan diplomatik ini, Indonesia kembali menghadapi sejarahnya sendiri.

Berdasarkan konsep dan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa dukungan Australia atas gerakan separatis di Papua merupakan upaya intervensi politik luar negeri terhadap kedaulatan Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan konklusi di atas, penulis menarik asumsi sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan di Papua dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
2. Adanya dukungan politik Australia terhadap gerakan separatis di Papua dengan memberikan suaka politik bagi warga Papua yang bermigrasi ilegal ke Australia.
3. NKRI Harga Mati merupakan diplomasi politik dan tegas dari pemerintah Indonesia kepada Australia.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah, serta asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : **“Dengan adanya keterlibatasan Australia dalam mendukung gerakan separatis/Papua Merdeka, maka Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap Australia ditandai dengan penyampaian nota protes RI, penarikan Duta Besar RI di Australia dan penghentian kerjasama militer RI - Australia”.**

Untuk memperjelas hipotesis, peneliti mengajukan definisi oprasional, sebagai berikut :

1. Sikap pemerintah Indonesia merupakan tindakan politik tegas Indonesia atas upaya-upaya intervensi Australia atas Papua, tindakan tegas tersebut dilakukan melalui pengiriman nota keberatan RI ke Australia melalui Kemenlu, panarikan diplomat Indonesia di Australia, penghentian kerjasama militer RI – Australia dan penundaan kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Australia.
2. Intervensi politik Australia merupakan tekanan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia melalui propaganda-propaganda internasional atas Papua, mengungkap pelanggaran HAM di Papua secara terbuka kepada masyarakat Internasional, memberikan suaka politik kepada anggota OPM yang melarikan diri ke Australia, memberikan dukungan kepada negara-negara pasifik yang membawa masalah HAM Papua ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB.
3. New York Agreement adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh [Amerika Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat) pada [1962](https://id.wikipedia.org/wiki/1962) untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas [Papua barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_barat) dari [Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda) ke [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia)[[31]](#footnote-31).
4. **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel dapat penulis uraikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel bebas :Dengan adanya keterlibatasan Australia dalam mendukung gerakan separatis/Papua Merdeka | 1. Pemberian suaka politik Australia kepada warga Papua yang bermigrasi ke Australia[[32]](#footnote-32)
2. Pengibaran bendera Organisisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia[[33]](#footnote-33).
3. OPM sayap militer[[34]](#footnote-34) dan KNPB sayap diplomasi[[35]](#footnote-35)
4. Adanya pernyataan sikap dukungan Australia atas Papua oleh PM John Howard[[36]](#footnote-36)
5. Dukungan politik dari negara-negara Pasifik Selatan melalui internasionalisasi di PBB dan Penyampaian pelanggaran HAM di Papua oleh enam negara Pasifik Selatan[[37]](#footnote-37) pada Sidang Umum PBB[[38]](#footnote-38)
 | 1. Keterlibatan Australia atas permasalahan di Papua
2. aktivitas gerakan separatsime Papua di Australia
3. Gerakan Separatisme Papua
4. Koalisi Australia, Amerika Serikat dan Inggris dukung kemerdekaan Papua[[39]](#footnote-39)
5. Adanya dukungan enam negara di Pasifik Selatan atas Papua[[40]](#footnote-40)
6. Indonesia adalah *associate member* dari MSG[[41]](#footnote-41)
 |
| Variabel terikat :maka Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap Australia ditandai dengan penyampaian nota protes RI, penarikan Duta Besar RI di Australia dan penghentian kerjasama militer RI - Australia  | * + 1. Penyampaian nota protes RI ke Australia melalui Kemenlu.
		2. Penarikan Duta Besar Indonesia di Australia.
		3. Penghentian kerjasama militer RI – Australia.
		4. Penundaan kunjungan Presiden Jokowi ke Australia
 | 1. Penyampaian Nota protes dilakukan atas tindakan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne [[42]](#footnote-42)
2. adanya Penyadapan terhadap Presiden RI[[43]](#footnote-43)
3. Penghinaan lambang dan ideologi negara[[44]](#footnote-44).
4. Adanya ancaman sekutu Australia[[45]](#footnote-45).
5. Indonesia minta Australia jangan ganggu soal Papua[[46]](#footnote-46).
6. Tokoh Papua dukung Indonesia atas Papua[[47]](#footnote-47).
 |

1. **Skema Kerangka Teoritik.**

Memperjelas hubungan teoritik di kerangka pemikiran, penulis menyampaikan skema kerangka teoritik, sebagai berikut :



1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.**
2. **Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

* + - 1. Metode Deskriptif Analisis yaitu metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai moralitas dan keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua dan upaya dalam menghadapi Australia.
			2. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan dengan adanya sikap intervensi Australia atas masalah Papua dan upaya internasionalisasi HAM Papua.
1. **Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan melalui buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan serta bahan bacaan lainnya sebagai pegangan serta berkaitan dengan sasaran penelitian.

## **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
2. Perpustakaan UNPAR Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Bandung.
3. Perpustakaan SESKOAD Jalan Gatot Subroto Bandung.
4. CSIS Jakarta.
5. Kementerian Luar Negeri RI Jakarta.
6. Kedutaan Besar Australia di Indonesia Jakarta.
7. Pusat Informasi Kompas Jakarta.
8. **Lamanya Penelitian**



## **Sistematika Penulisan.**

## Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya :

**BAB 1 Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

**BAB 2 Pembahasan Variabel Bebas**

Berisi tentang pembahasan sikap pemerintah Indonesia atas adanya intervensi Australia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara Pasifik Selatan untuk menjadikan isu HAM di Papua sebagai bagian dari kepentingan internasional.

**BAB 3 Pembahasan Variabel Terikat**

Berisi tentang pembahasan yang meliputi konflik dan akar konflik, aktor-aktor konflik di Papua, kepentingan Australia dalam mendukung kemerdekaan di Papua, sikap pemerintah terhdap keterlibatan Australia dalam mendukung kemerdekaan di Papua.

**BAB 4 Pembahasan Analisis**

Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.

**BAB 5 Kesimpulan**

Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas

1. Yan Pieter Rumbiak, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran HAM dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi, Jakarta:Papua Internal Education, 2005, hlm..36 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tuhana Taufiq Andrianto, Mengapa Papua Bergolak, Yogyakarta: Gama Global Media, 2001, hlm.151 [↑](#footnote-ref-2)
3. Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas, Muridan S. Widjojo, Rosita Dewi. 2008. Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Jakarta, LIPI Press, , hlm.2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kompas, “Visa Australia dan Penanganan Papua”, 24 Maret 2006, diakses dari http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.html [↑](#footnote-ref-4)
5. Disampaikan dalam Konferensi Nasional HAM II. HAM dan Tata Kelola Pemerintahan Baru Indonesia. Kerjasama PUSHAM UNIMED dengan PANRANHAM Provinsi Sumatera Utara dan SEPAHAM Indonesia, kampus UNIMED, Medan, Sumatera Utara, Sabtu-Minggu/11-12 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Neles Tebay, *Dialog Jakarta-Papua. Sebuah Perspektif Papua*, Sekretariat Keadilan dan Pedamaian Keuskupan Jayapura, Jayapura 2011 (cetakan kedua), hal. 1. Baca juga, Muridan S. Wijoyo, dkk. *Papua Road Map.* *Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, hal. 3-6., LIPI, Yayasan TIFA, YayasanObor Indonesia, Jakarta, tahun 2009. [↑](#footnote-ref-6)
7. DIREKTUR Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei) di Yogyakarta (website:  [http://www.interfidei.or.id](http://www.interfidei.or.id/)) diakses tanggal 2 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-7)
8. Liputan6, “Dubes Indonesia Untuk Australia Ditarik Pulang”, 24 Maret 2006, diakses dari http://news.liputan6.com/read/119899/dubes-indonesia-untuk-australia-ditarik-pulang [↑](#footnote-ref-8)
9. Suara Papua, “Peringatan HUT Papua Merdeka, 10 Kota Di Australia Kibarkan Bendera Bintang Kejora”, 27 Agustus 2014, diakses dari http://suarapapua.com/2014/08/27/peringati-hut-papua-merdeka-10-kota-di-australia-kibarkan-bendera-bintang-kejora/ [↑](#footnote-ref-9)
10. Menko Polhukam telah mencoba membuka diri dan tindaklanjutnya sangat ditunggu. Jangan sampai karena berlama-lama, maka tayangan pelanggaran HAM di Tanah Papua ini menjadi senjata ampuh bagi kemompok separatis, yang sejatinya tidak cukup kuat itu, dapat bangkit kembali karena ia lantas mampu menarik perhatian dan opini publik nasional dan internasional. Janganlah hanya karena nila setitik lantas bisa merusak susu sebelanga. Kedaulatan NKRI dan kesatuan serta persatuan nasional kita tak boleh dirusak oleh perbuatan para pelanggar HAM yang, pada giliranny, dapat dieksploitasi oleh separatis OPM, sumber dari <https://web.facebook.com/notes/muhammad-a-s-hikam/menuntaskan-masalah-pelanggaran-ham-oleh-militer-di-papua/446552491261>, diakses tanggal 1 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. McClelland, dalam Anda, 2000 hlm 54 [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert Jackson dan Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, Pustaka Pelajar,Yogytakarta, Februari 2005, hlm 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Keohane dan Nye 1972 [↑](#footnote-ref-13)
14. Laura neack, the new foreign policy: power seeking in a globalized era, Maryland: rowman & littlefield publishers,2008, hlm 9 [↑](#footnote-ref-14)
15. P.N.H Simanjuntak, 2003, [*Pendidikan Kewarganegaraan*](http://books.google.co.id/books?id=o_a-ipMJVQIC&pg=PT160&dq=teori+kedaulatan+rakyat&hl=en&sa=X&ei=DB6bU4jLLZL-8QWApYLIBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20kedaulatan%20rakyat&f=false). Jakarta : Grasindo. hlm. 151. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. P. Antonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, Hlm.163 [↑](#footnote-ref-17)
18. Arnold Wolfers, dalam Robert L.Pfatzgraff, Jr dan James E. Doughtery. 1997. “Contending theories in International Relations”, New York JB. Lippncot CO [↑](#footnote-ref-18)
19. Coloumbus, Theodore A. and James H. Wolfe. 1981.” Introduction to International Relations, Power and Justice. New Delhi: Prentice Hall of India”. [↑](#footnote-ref-19)
20. T May Rudy. Studi Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT.Refika Aditama, 2002, hlm.65 [↑](#footnote-ref-20)
21. George Ritzer, Goodman, Douglas J. Theori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana, 2003 [↑](#footnote-ref-21)
22. James L. Gibson, John M. Ivancevic, James H. Donnelly. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Binarupa Aksara, 1977 [↑](#footnote-ref-22)
23. Thompson, J. Milburn,Justin and Peace: aChristian primer,Maryknoll, N.Y.: OrbisBooks, 1997 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dr. Ali Sastroamidjojo, SH., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Batara, Jakarta 1971, hal.108 [↑](#footnote-ref-24)
25. Bryan A. Garner ed., *Black’s Law Dictionary* , Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. *, Azaz-azaz Hukum Publik Internasional,* PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967, hal.149-150 [↑](#footnote-ref-26)
27. Bishop, R. Doak; Crawford, James and William Michael Reisman (2005). *Foreign Investment Disputes: Cases, Materials, and Commentary*. [Wolters Kluwer](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolters_Kluwer&action=edit&redlink=1). pp. 609–611 [↑](#footnote-ref-27)
28. Lintner, Bertil (January 22, 2009). ["Papuans Try to Keep Cause Alive"](http://www.thejakartaglobe.com/people/papuans-try-to-keep-cause-alive/305546). Jakarta Globe. [↑](#footnote-ref-28)
29. http://www.dw.com/id/tidak-ada-jalan-lain-papua-harus-dibuka/a-19203419 [↑](#footnote-ref-29)
30. **Made Supriatma** peneliti dan jurnalis independen. Tulisan dan laporannya sering muncul di majalah online IndoProgress. Fokus penelitiannya adalah politik militer, konlfik dan kekerasan etnik, serta politik identitas. [↑](#footnote-ref-30)
31. Stefanus Satrio Aribowo, 2012, Mengenang Kisah Kepahlawanan Pejuang Trikora, Jakarta : Kompas, hlm 12-17 [↑](#footnote-ref-31)
32. Indonesia Menyesalkan Pemberian Visa Tinggal Sementara oleh Pemerintah Australia kepada Warga Papua Pencari Suaka, [htthttp://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Menyesalkan-Pemberian-Visa-Tinggal-Sementara-oleh-Pemerintah-Australia-kepada-Warga-Papua-.aspxp://leuserantara.com/artikel-penyesalan-aktivis-asal-papua-di-australia/](http://leuserantara.com/artikel-penyesalan-aktivis-asal-papua-di-australia/), diakses 10 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-32)
33. #  Rakhmatulloh, Pemerintah Didesak Kirim Nota Protes ke Australia, sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/1169405/14/pemerintah-didesak-kirim-nota-protes-ke-australia-1483962979>, diakses 10 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-33)
34. #  Sayap Militer OPM Menjamur di Pegunungan Tengah Papua, <http://metromerauke.com/2016/08/27/sayap-militer-opm-menjamur-di-pegunungan-tengah-papua/>, diakses 10 januari 2017 2017.

 [↑](#footnote-ref-34)
35. #  Posisi Penting Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam Diplomasi Perjuangan Papua di Vanuatu, <http://www.kompasiana.com/evha.uaga/posisi-penting-komite-nasional-papua-barat-knpb-dalam-diplomasi-perjuangan-papua-di-vanuatu_54f99932a3331118568b461b>, diakses 10 Januari 2017

 [↑](#footnote-ref-35)
36. Suradi dan Inno Jemabut, PM Howard Didesak Dukung Papua Merdeka, <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5862&coid=1&caid=59&gid=3>, diakses 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-36)
37. Jawaban RI atas Tuduhan 6 Negara Pasifik Terkait Papua, <http://global.liputan6.com/read/2612114/jawaban-ri-atas-tuduhan-6-negara-pasifik-terkait-papua>, diakses tanggal 28 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-37)
38. ##  Indonesia Mesti Waspadai Upaya Internasionalisasi Isu HAM di Papua,

## <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/08/15/nt34ha257-indonesia-mesti-waspadai-upaya-internasionalisasi-isu-ham-di-papua>, diakses tanggal 28 Desember 2016.

 [↑](#footnote-ref-38)
39. <http://www.kompasiana.com/haramli/koalisi-amerika-inggris-australia-untuk-kemerdekaan-papua-barat_550ffcc1a333117732ba8124>, diakses tanggal 12 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-39)
40. #  Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik, <http://international.sindonews.com/read/1143187/40/berani-ikut-campur-urusan-ri-soal-papua-ini-dalih-negara-pasifik-1475126172>, diakses 10 Jaunari 2017.

 [↑](#footnote-ref-40)
41. #  MSG Tolak ULMWP, Luhut: Ini Salah Satu Kemenangan Indonesia, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/15/120787816/msg-tolak-ulmwp-luhut-ini-salah-satu-kemenangan-indonesia>, diakses 28 Desember 2016.

 [↑](#footnote-ref-41)
42. Bendera Papua Merdeka Dikibarkan di Gedung KJRI Melbourne, <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/06/16425841/bendera.papua.merdeka.dikibarkan.di.gedung.kjri.melbourne>, diakses tanggal 28 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-42)
43. Penarikan Duber RI di Australia dinilai terlambat, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/459580-penarikan-dubes-ri-di-australia-dinilai-terlambat>, diakses tanggal 28 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-43)
44. #  Silviana Dharma, Ini Penyebab Utama Indonesia Tangguhkan Kerjasama Militer dengan Australia, sumber : <http://news.okezone.com/read/2017/01/05/18/1584025/ini-penyebab-utama-indonesia-tangguhkan-kerjasama-militer-dengan-australia>, 10 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-44)
45. ###  Tabloid Intelejen, [Pangkalan Militer AS di Australia Terkait Kondisi di Papua](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjWtMXwlIvSAhUHLI8KHZuICv0QFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.intelijen.co.id%2Fpangkalan-militer-as-di-australia-terkait-kondisi-di-papua%2F&usg=AFQjCNGp4udEjp9P-DrN8ZPBzlESFJ88Xw), sumber <https://www.intelijen.co.id/pangkalan-militer-as-di-australia-terkait-kondisi-di-papua/>, diakses 10 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-45)
46. #  Raiza Andini, Menhan RI: Australia Jangan Ikut Campur soal Papua, sumber : <http://news.okezone.com/read/2016/10/28/18/1526694/menhan-ri-australia-jangan-ikut-campur-soal-papua>, diakses 10 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-46)
47. #  Wilpret Siagian, Ribuan Warga Papua Turun ke Jalan di Jayapura: Dukung NKRI!, sumber : <http://news.detik.com/berita/3223470/ribuan-warga-papua-turun-ke-jalan-di-jayapura-dukung-nkri>, diakses tanggal 7 Februari 2017.

 [↑](#footnote-ref-47)